BAB II

LANDASAN TEORI

A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Sekilas Mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Desa merupakan unit terkecil dari Negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Sebagai wakil Negara, desa berkewajiban melakukan pembangunan baik dari segi fisik ataupun sumber daya manusianya, sebagai upaya meningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016, disebutkan bahwa:[1]

> "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mnegurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Jesatuan Republik Indonesia."

Disamping itu, konsep keislaman dalam pengembangan masyarakat juga memanufaktuure BUMDes Gondang menerapkan nilai-nilai keislaman sebagai landasan untuk melakukan suatu kegiatan. Maka pemerintah Desa menerapkan etos kerja yang tertuang dalam Al-Qur'an

[1]Oemar Moechthar, *"Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia"*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), hlm 317

surat An-Naml ayat 88:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

Artinya: Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetdaftarap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.[2]

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawacita pertama, ketiga, kelima, dan ketujuh dengan permaknaan sebagai berikut:

a. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi Negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa.
b. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif.
c. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menngkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di desa.
d. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonmi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 6/2014, yang disebut

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1984), hlm. 88

dengan BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dalam Pasal 87 UU No. 6/2014, desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan, menjalankan usaha dibidang ekonomi atau pelayanan umum, dan tidak hanya berfokus pada keuntungan keuangan, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan.[3] Hasil dari usaha BUMDes digunakan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat tidak mampu.

2. Karakteristik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes dilahirkan sebagai pendekatan baru dalam usaha untuk meningkatkan perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes ini dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa.[4] Cara kerja BUMDes itu sendiri dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola dengan profesional, tetapi tetap bersandar pada potensi asli desa. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen

[3]*Ibid..,* 319

[4]Oemar Moechthar, *Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia*…,hlm. 319-320

pemerintah kedepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang akan disejahterakan, yaitu dengan membentuk BUMDes yang sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang menyebutkan bahwa:

> "Untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuaidengan kebutuhan dan potensi desa."

Keberadaan desa baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hokum adat menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga pemerintah, desa merupakan *basis system* kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat dijadikan suatu landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis. Melalui desa BUMDes dapat diselenggarakan dengan mengacu peraturan desa berdasarkan pada peratuuran daerah.

BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDes juga melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

3. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Tujuan Didirikan BUMdes[5]

1) Meningkatkan perekonomian desa.
2) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6) Membuka lapangan kerja.
7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
8) Meningkatkan ppendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Ada empat tujuan utama dari pendirian BUMDes yaitu:[6]

1) Meningkatkan perekonomian desa.
2) Meningkatkan pendapatan asli desa.
3) Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan

---

[5]Purnomo, 2004, *"Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa"*, Makalah, Lombok Timur: BPMD, hlm 17-18

[6]Kasmaroesid, Herry, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 2.

kebutuhan masyarakat.

4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di pedesaan.

BUMDes pada Pasal 3 PermenDesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDes didirikan untuk tujuan meningkatkan pendapatan desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan potensi desa serta dapat mensejahterakan masyarakat.

b. Tujuan dibentuk BUMDes menurut Purnoo

1) Menumbuh kembangkan perekonomian desa.
2) Meningkatkan sumber pendapatan asli desa.
3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa.
4) Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.

c. Tujuan dibentuk BUMDes

1) Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
2) Menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa.
3) Menumbuh kembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.
4) Menigkatkan kreativitas berwira usaha desa masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

4. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

Sutoro Eko memberikan klasifikasi terkait jenis usaha yang dilakukan BUMDes yang dijelaskan dalam table dibawah ini:[7]

Tabel 2.1

TIPE	DESKRIPSI	CONTOH
Serving	BUMDes menjalankan "bisnis sosial" yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan public kepada masyarakat. Dengan kalimat ini, BUMDes ini memberikan *social benefits* kepada warga, meskipun tidak memperoleh *economic profit* yang besar.	Usaha air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan.
Banking	BUMDes menjalankan "bisnis uang", yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapattkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional.	Bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa.
Renting	BUMDes menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebuttuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan dibanyak desa, terutama desa-desa di Jawa.	Penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah took, tanah dan sebagainya.
Brokering	BUMDes menjadi 'lembaga perantara' yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUMDes menjual jasa pelayanan kepada warga dan	Jasa pembayaran listrik. Desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.

[7]Oemar Moechthar, *Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia…*, hal. 334-335.

	usaha-usaha masyarakat.	
Trading	BUMDes menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.	Pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dsb.
Holding	BUMDes sebagai "usaha bersama" atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama.	Kapal desa yang berskala besar untuk mengorganisasi dan mewadahi nelayan-nelayan kecil. Desa wisata yang mengorganisasi berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat: makanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian, penginapan, dsb.

5. Indikator Pengelolaan dan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDesa sedapat mungkin dibangun atas semangat dari keinginan masyarakat dengan mengemban prinsip-prinsip kooperatif dan partisipatif, serta pengeleloaanya dilakukan secara profesional dan mandiri. Prinsip pengelolaan BUMDesa yaitu:[8]

a. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangannya dan kelangsungan hidup usahanya.

b. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus

[8] Kongres Pancasila IV*: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia,* (Yogyakarta:PSP UGM, 2012), hal. 334

bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDesa.

c. Emansipatif

Semua komponen yang terlibat harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

d. Transaparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

e. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.

f. Sustainabel

Kegiatan usaha harus dapat dikembangankan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDesa.

Terkait dengan peran BUMDESA, maka diharapkan proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDESA diharapkan akan lebih berdaya. Adapun indikator Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu:[9]

a. Meningkatkan pendapatan

[9] Halimatus Sakdiah, *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Di Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: 2018), hal. 31

Peningkatan pendapatan asli desa yaitu dalam rangka mendukung kemampuan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

b. Mengembangkan potensi perekonomian

Pengembangan di wilayah perdesaan, yaitu untuk mendorong peningkatkan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan.

c. Menciptakan lapangan kerja

yaitu dalam upaya menguranggi pengganguran dan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan usaha-usaha ekonomi produktif serta peningkatan kreatifitas beriwausaha bagi masyarakat desa melalui simpan pinjam yang telah di kelola oleh pemerintah desa dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA)

d. Meningkatkan peran masyarakat

Peran masyarakat dalam mengelola bantuan modal yang berasal dari pemerintah dan pemerintah Kabupaten serta sumber lain yang sah.

B. Peningkatan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Peningkatan Perekonomian

Peningkatan berarti kemajuan, perubahan, perbaikan. Sedangkan perekonomian yang mempunyai kata dasar ekonomi berarti ilmu

mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti halnya keuangan, perindustrian danperdagangan). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian adalah suatu perubahan jenjang atau perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah ke arah perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya.

2. Ekonomi kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah sebuah perekonomian yang dimiliki oleh rakyat kecil dan didominasi oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berarti mengembangkan sistem ekonomi yang berasas dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Membangun ekonomi rakyat berarti harus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendominasikan potensinya, atau dengan kata lain memberdayakannya. Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar masyarakat dapat digali dan dimanfaatkan. Dengan demikian masyarakat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka.

Dalam surat An-Nahl ayat 71 dapat dijadikan sebagai salah satu

dasar membangun konsep ekonomi kerakyatan dalam Islam. Adapun ayat tersebut berbunyi:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Artinya: Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

Menurut Mubyarto, pengembangan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga segi, yaitu:[10]

a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
b. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Dalam rangka memperkuat potensi ekonomi rakyat ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
c. Mengembangkan ekonomi rakyat juga mengandung arti melindungi

[10] Harry Hikmat, *Pemberdayaan Masyarakat,* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001), hlm. 3

masyarakat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi masyarakat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.

3. Indikator Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Adapun indikator Peningkatan Perekonomian Masyarakat menurut Sri Eka:[11]

a. Sumber Daya Alam

Sebagian besar masyarakat bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembanguan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampaun sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud dinataranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

b. Sumber Daya Manusia

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya masyarakat merupakan faktor terpenting dalam proses pertumbuhan

[11] Sri Eka Astutiningsih, Pemberdayaan Kelompok Agroindustri Dalam Upaya Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur, *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan Juni 2017; 02(1): 1-9 ISSN 2541-1470*, hal. 5

ekonomi, cepat lambatnya proses pertumbuhan ekonomi tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan ekonomi.

c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

d. Budaya

Budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya.

e. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa

barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

Sedangkan Lincolin mendefinisikan unsure pembangunan ekonomi sebagai berikut:[12]

a. Berkelanjutan

   Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus

b. Pendapatan

   Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita. Kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.

c. Pemenuhan Kebutuhan

   Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*),

d. Perbaikan sistem

   Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu aspek perbaikan di bidang organisasi (institusi) dan perbaikan di bidang regulasi (baik legal formal maupun informal).

---

[12] Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN: 2015), hal.

C. Pengaruh Pengelolaan dan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Peningkatan Perekonomian masyarakat

Pengelolaan merupakan suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya baik manusia maupun alam untuk mencapai tujuan yang diharapkan agar berjalan efektif dan efesien. Menurut George R. Terry fungsi pokok dari manajemen yaitu: planning, organizing, actuating, dan controlling.[13] Prinsip pengelolaan BUMDes ini adalah perwujudan pengelolaan ekonomi produktif Desa yang dilakukan secara komperatif, pastisifatif, emansifasif dan trasnparansi. Jadi disini pengelolaan sangat berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, dikarenakan pengelolaan ini adalah dasar dari berjalannya suatu organisasi atau kegiatan. Dimana pengelolaan ini dapat memberikan dampak baik untuk BUMDes kedepannya.

Peran adalah bentuk dari tanggung jawab yang berkaitan kedudukan, fungsi dan kewenangan yang dimiliki seseorang atau kelompok. Pengaruh peran BUMDes terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, dimana peran BUMdes ini sangat penting dikarenakan peran disini memiliki

[13] John Suprihanto, *Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014). Hlm. 9-10.

beberapa dimensi seperti sebagai alat komunikasi, sebagai terapi, sebagai suatu kebijakan dan sebagai penganut strategi. Dimana peran ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian. Dengan adanya peran BUMDes dapat meningkatkan perekonomian pendapatan asli desa, dapat mengembangkan potensi perekonomian disuatu Desa, mampu menciptakan lapangan pekerjaan, dan dapat meningkatkan peran masyarakat desa dalam mengelola bantuan modal yang berasal dari pemerintah dan sumber lainnya.

D. Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu pada dasarnya adalah bagian yang penting dalam sebuah karya ilmiah. Adanya tinjaun penelitian terdahulu dimaksudkan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti plagiarisme. Tujuan utama dilampirkannya adalah untuk menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Maka, Peneliti terdahulu diantaranya yang berkaitan adalah

1. Skripsi yang ditulis oleh Andriani Sari, mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Fakulktas Ekonomi Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan, yang berjudul "*Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai* yang ditulis pada tahun 2017." Andriani Sari "memaparkan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

sebagai penguatan ekonomi desa. Badan usaha milik desa ini merupakan lembaga yang bergerak dibidang social dan economi dan sagai penyedia layanan terhadap masyarakat desa mengenai bidang usaha. Keberadaan badan usaha milik desa disini sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagei yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Dengan adanya BUMDes ini, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya BUMDes berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi desa dengan baik."

2. Skripsi yang ditulis oleh Corysta Berlian Ramadana, Heru Ribawanto berjudul *"Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai penguatan ekonimu Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang"* yang memamparkan bahwa keberadaan badan usaha milik desa sangat sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Malang yang diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Akan tetapi semua bidang usaha saat ini belum berjalan dan belum dapat menyokong pendapatan desa. Sehingga dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik desa ini hanya sebatas papan nama saja.
3. Jurnal yang ditulis oleh Irkham Abdur Rochim berjudul *"Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)"* yang memaparkan bahwa Peran BUMdes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat telah terealisasi dengan adanya

beberapa unit usaha yang sudah berdiri.

4. Jurnal yang ditulis oleh Samadi, Arrafiqur Rahman, Afrizal berjudul *"Peranan BUMdes dakam peningkatan ekonomi masyarakat (Studi BUMdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Huku Kabupaten Rokan Hulu)"* yang memamparkan bahwa peningkatan perekonomian hanya terjadi pada pengguna dana BUMDes dibidang perdagangan gorengan, perdagangan barang pecah belah, perdagangan kelontong, pada perkebunan kelapa sawit dan bidang jasa. Namun pada perkebunan karet belum terjadi peningkatan perekonomiannya
5. Jurnal yang ditulis oleh Maria Rosa Ratna Sri Anggraini yang berjudul Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta.

Tabel 2.2

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan mengenai

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Andriani Sari	Pengaruh BUMdes terhadap pengembangan ekonomi desa di kecamatan perbaungan	memaparkan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penguatan ekonomi desa**.** Badan usaha milik desa ini merupakan lembaga yang bergerak dibidang social dan economi dan sagai penyedia layanan terhadap masyarakat desa mengenai bidang usaha. Keberadaan badan usaha milik desa disini sesuai dengan peraturan daerah	Persamaan: Fokus masalah pada BUMdes Perbedaan: -Penelitian kualitatif -Metode penelitian

			Kabupaten Serdang Bedagei yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Dengan adanya BUMDes ini, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya BUMDes berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi desa dengan baik	
2	Corysta Berlian Ramadana, Heru Ribawanto	Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai penguatan ekonimu Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)	bahwa keberadaan badan usaha milik desa sangat sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Malang yang diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Akan tetapi semua bidang usaha saat ini belum berjalan dan belum dapat menyokong pendapatan desa. Sehingga dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik desa ini hanya sebatas papan nama saja	Persamaan: Fokus masalah pada BUMdes Perbedaan: -penelitian kualitatif -metode penelitian
3	Irkham Abdur Rochim	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)	Peran BUMdes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat telah terealisasi dengan adanya beberapa unit usaha yang sudah berdiri.	Persamaan: Fokus masalah pada BUMdes Perbedaan: -penelitian Kualitatif Metode Penelitian
4	Samadi,	Peranan BUMdes	peningkatan	Persamaan:

	Arrafiqur Rahman, Afrizal	dakam peningkatan ekonomi masyarakat (Studi BUMdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Huku Kabupaten Rokan Hulu)	perekonomian hanya terjadi pada pengguna dana BUMDes dibidang perdagangan gorengan, perdagangan barang pecah belah, perdagangan kelontong, pada perkebunan kelapa sawit dan bidang jasa. Namun pada perkebunan karet belum terjadi peningkatan perekonomiannya.	Fokus masalah pada BUMdes Perbedaan: -penelitian Kualitatif Metode Penelitian
5	Maria Rosa Ratna Sri Anggraini	Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta		Persamaan: Fokus masalah pada BUMdes Perbedaan: -Penelitian Kualitatif Metode penelitian

persamaan penelitian terdahulu dengan saat ini adalah pada titik fokus masalah yang membahas terkait BUMDes. Sedagkan perbedaannya, dengan penelitian saat ini bahasannya kebih spesifik.

E. Kerangka Konseptual

Dari skripsi yang berjudul Pengaruh Pengelolaan Dan Peran Bumdes Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Variabel penelitiannya: pengelolaan BUMDes (X_1), dan peran BUMDes (X_2) peningkatan ekonomi (Y).

Meningkatkan perekonomian masyarakat merupakan tujuan yang diharapkan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi dapat terlaksana dengan

baik. BUMDes disini berperan sebagai lembaga pembuka gerbang usaha dan bentuk unit usaha. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan cara mendirikan BUMDes. Masyarakat dalam menjalankan BUMDes ini harus mengelolanya dengan efektif, agar tujuan yang sudah dibuat dapat tercapai.

F. Hipotesis

Hipotesis yang dapat diambil dari peneelitian sementara ini, yakni:

1. H_0 : Tidak ada pengaruh signifikan antara variabel pengelolaan BUMDes terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.
2. H_a : ada pengaruh signifikan antara variabel peran BUMDes terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.